



Implementasi Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur

Implementation of the Law on Population Administration in the Office of Population and Civil Registration of East Aceh Regency

Denny Sutejo¹, Heri Kusmanto², Warjio² & Anggreni Atmei Lubis³

¹Magister Program Studi Administrasi Publik, Universitas Medan Area, Indonesia

²Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Sumatera Utara, Indonesia

³Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur dan menganalisis faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Secara umum implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur belum dilaksanakan dengan baik. Beberapa hal yang dapat disarankan antara lain melakukan komunikasi secara langsung dan kontinu kepada masyarakat, menambah aparatur, melengkapi fasilitas dan membuat SOP terkait pelaksanaan undang-undang tersebut.

Kata Kunci: Administrasi, Implementasi, Kependudukan

Abstract

The purpose of this research is to analyze the implementation of Law Number 24 of 2013 concerning Population Administration in the Department of Population and Civil Registration of East Aceh Regency and to analyze the factors that influence it. This study used descriptive qualitative method. In general, the implementation of the policy of Law Number 24 of 2013 concerning Population Administration in the Office of Population and Civil Registration of East Aceh Regency has not been implemented properly. Several things that can be suggested include direct and continuous communication with the public, adding to the apparatus, completing facilities and making SOPs related to the implementation of the law.

Keywords: Administration, Implementation, Population

How to Cite: Sutejo, D., Kusmanto, H., Warjio, & Lubis, A.A. (2020). Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Sumber Sari Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik, 2(2) 2020: 162-167*

*E-mail: herlina@gmail.com



PENDAHULUAN

Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah disahkan oleh DPR RI pada tanggal 26 November 2013. Perubahan Undang-Undang ini merupakan perubahan yang mendasar di bidang administrasi kependudukan. Tujuan utama dari perubahan Undang-Undang tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta ketunggalan dokumen kependudukan.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 13 Tahun 2017 tanggal 9 Januari 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur yang mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di Bidang Administrasi Kependudukan dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku (Ngarsiningtyas & Sembiring, 2016; Pinayungan Dkk, 2018). Adapun Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu : Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pelayanan, dengan indikator kinerja pelayanan sebagai berikut Ratio keluarga ber Kartu Keluarga per satuan kepala keluarga, pada awal renstra mencapai 87 %, diproyeksikan tahun 2017 mencapai 98 % dan tahun 2018 mencapai 99 %, dan karena seiring dengan penggantian KTP elektronik, maka penerbitan KK disesuaikan dengan NIK pada saat Enrollmant, Ratio penduduk ber KTP per satuan penduduk wajib KTP (Versi KTP Nasional) pada awal rentra mencapai 93 %, diproyeksikan tahun 2017 mencapai 95 % dan tahun 2018 mencapai 98 %. Seiring dengan program penerapan KTP elektronik, maka penerbitan KTP Nasional dihentikan dan diganti dengan KTP elektronik Ratio penduduk ber KTP-el per satuan penduduk (Versi KTP elektronik) pada awal Renstra diproyeksikan tahun 2017 mencapai 89 % dan tahun 2018 mencapai 95 %, Ratio Penduduk Wajib KTP-el yang tidak melakukan perekaman KTP-el tahun 2017 mencapai 9,9 %, Rasio bayi ber Akta kelahiran belum dapat kami perhitungkan mengingat belum tersedia data, dan sebagai gantinya kami gunakan perhitungan rasio penduduk ber akta kelahiran dengan capaian awal renstra mencapai 189.049 Akta dan tahun 2017 mencapai 220.000 Akta serta diproyeksikan pada tahun 2018 mencapai 240.000 Akta. (Renja Disdukcapil Aceh Timur, 2018).

Penelitian awal yang penulis lakukan mengenai kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2018, antara lain Masih rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan, Terbatasnya profesionalitas aparatur , khususnya dalam hal



Kompetensi dibidang kependudukan dan pencatatan sipil, Kurangnya peran Pemerintah Propinsi dalam program penataan administrasi kependudukan, sehingga menjadi kendala dalam koordinasi dan konsultasi, Kurangnya kesempatan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian, Belum sempurnanya program system informasi administrasi kependudukan, yang merupakan produk reformasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang secara terus menerus masih dilakukan perbaikan dan penyempurnaan, Belum terlaksananya jaringan SIAK online antara kecamatan dengan kabupaten, sehingga data penduduk yang bersifat dinamis belum akurat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bermaksud mengetahui dan menggambarkan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Aceh Timur berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, dengan demikian penelitian akan mengarah pada penelitian deskriptif kualitatif yang lebih menekankan pada pengungkapam makna dari pelayanan administrasi kependudukan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur. Teknik Analisa data yang digunakan adalah teknik analisa deskriptif dimana data-data dalam bentuk kualitatif khususnya dari wawancara. Secara induktif peneliti akan mencoba mengolah data yang bersifat kualitatif untuk menarik kesimpulan tentang bagaimana pelayanan administrasi kependudukan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur berdasarkan teori George C. Edward III dalam Mulyadi, (2015) berdasarkan 4 (empat) variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses penetapan kebijakan atau yang sering dikenal dengan policy making process, menurut Shafrits dan Russel dalam Keban (2004) yang pertama merupakan agenda setting dimana isu-isu kebijakan diidentifikasi, (2) keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan kebijakan, (3) tahap implementasi kebijakan, (4) evaluasi program dan analisa dampak, (5) feedback yaitu memutuskan untuk merevisi atau menghentikan.

Proses kebijakan diatas bila diterapkan akan menyerupai sebuah siklus tahapan penetapan kebijakan. Dengan demikian kebijakan publik adalah produk dari pemerintah maupun aparatur pemerintah yang hakekatnya berupa pilihan-pilihan yang dianggap paling baik, untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi publik dengan tujuan untuk dicarikan solusi pemecahannya secara tepat, cepat dan akurat, sehingga benar adanya apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan pemerintah dapat saja dipandang sebagai sebuah pilihan kebijakan.

Menurut George C. Edward III dalam Mulyadi, (2015) mengemukakan beberapa 4 (empat) variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.



Komunikasi, Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Sumberdaya, Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Disposisi, Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Dari pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa keempat variabel tersebut merupakan suatu sistem yang tidak dapat dipisahkan dan saling berhubungan satu sama lain sehingga untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan perlu dilakukan secara sinergi dan intensif.

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah disahkan oleh DPR RI pada tanggal 26 November 2013 merupakan perubahan yang mendasar dibidang administrasi kependudukan. Tujuan utama dari perubahan Undang-Undang dimaksud adalah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta ketunggalan dokumen kependudukan.

Berdasarkan Qanun Aceh Timur No. 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur Setiap penduduk tinggal tetap, penduduk tinggal sementara dan penduduk rentan administrasi kependudukan berhak mendapatkan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil tidak dipungut biaya (gratis).

Variabel meliputi komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam pelaksanaan/implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dapat disimpulkan bahwa implementasi belum berjalan secara optimal (Jaffisa Dkk, 2017). Hal ini disebabkan oleh; pertama, komunikasi yang berjalan belum cukup baik antara Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Timur yang diwakili oleh Disdukcapil Aceh Timur dengan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh Disdukcapil Aceh Timur tidak melakukan sosialisai kepada masyarakat secara langsung dan kontinyu. Hal ini berakibat pada hanya sebagian masyarakat yang mengetahui kebijakan undang-undang ini, dan berdampak pada kurangnya peran serta masyarakat dalam implementasi kebijakan undang-undang ini. Kedua, Sumberdaya dalam implementasi kebijakan undang-undang ini masih kurang, khususnya di Disdukcapil Aceh Timur. Kurangnya sumberdaya manusia maupun fasilitas pendukung dalam implementasi kebijakan undang-undang ini akan berdampak langsung pada tidak optimalnya pelaksanaan/implementasi kebijakan undang-undang terkait. Ketiga, struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan undang-undang ini belum berjalan dengan baik. Hal ini



disebabkan oleh tidak adanya S.O.P yang khusus mengatur implementasi kebijakan undang-undang ini. Karena, dengan tidak adanya S.O.P yang khusus mengatur dapat berdampak pada tidak optimalnya implementasi kebijakan undang-undang terkait. Sedangkan dari segi disposisi sendiri sudah berjalan dengan baik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Kantor Disdukcapil Aceh Timur berjalan dengan baik (Sinulingga Dkk, 2018).

SIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dalam penulisan tesis ini dapat ditarik kesimpulan mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur dan faktor yang menjadi hambatan pelaksanaannya berdasarkan teori Edward III yang meliputi 4 variabel antara lain komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagai berikut Secara umum implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur belum dilaksanakan dengan baik, hal ini dilihat dari komunikasi belum cukup baik antara Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Timur yang diwakili oleh Disdukcapil Aceh Timur dengan masyarakat. Sumberdaya dalam implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan ini masih kurang di Kantor Disdukcapil Aceh Timur. Dari segi disposisi sudah berjalan dengan baik. Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan belum baik. Faktor yang mempengaruhi implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur, antara lain Tidak adanya komunikasi secara langsung dan kontinyu yang dilakukan Disdukcapil Aceh Timur dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat. Ketersediaan Petugas yang dipilih belum merata terkait dengan kurangnya jumlah aparatur yang bertugas ke lapangan. Fasilitas belum cukup memadai dan baik, seperti kurangnya kendaraan operasional yang ada di Kantor Disdukcapil Aceh Timur. Tidak adanya S.O.P khusus di dalam undang-undang dalam pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan. Dana operasional yang minim, Kurangnya kesadaran dan peran masyarakat dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, J. E, (2003), Public Policy Making: An Introduction Fifth Edition, Boston: Houghton Mifflin Company
- Anggara, S. (2014). "Kebijakan Publik" Bandung : CV Pustaka Setia
- Angkat, K.M., Abdul K., Isnaini, (2016), Analisis Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal : Public Administration Journal, 7 (1): 33-48



- Bungin, B. (2007). Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya. Jakarta: Putra Grafika
- Cahyaningrum, A., & Ardhian Nugroho, R. (2019). Inovasi Pelayanan melalui Aplikasi “Dukcapil Dalam Genggaman” oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. *Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 7(2), 103-115. doi:<https://doi.org/10.31289/publika.v7i2.2999>
- Chair, A., & Kariono, (2011), Profesionalisme Aparatur Birokrasi (Studi pada Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu), *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal : Public Administration Journal*, 1 (1): 1-6
- Dunn, W. N. (2000). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Hanindita Graha Widya
- Dye, T. R. (2005). *Understanding Public Policy*, Eleventh Edition, New Jersey: Pearson Prentice Hall
- Islamy, I. (2003). Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bina Aksara
- Jaffisa, T., Kadir, A. & Dumasari, H. (2017), Peranan Camat dalam Pengawasan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan, *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal : Public Administration Journal*, 7 (1): 94-93
- Keban, T. Y.. (2004). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu. Gava Media. Yogyakarta
- Moleong, L. J. (2010). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Mulyadi. (2015). Akuntansi Biaya, Edisi 5. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Musanef, (2016). Manajemen Kepegawaian di Indonesia. Jakarta: Toko Gunung Agung
- Ngarsiningtyas, S.K. & Sembiring, W.M. (2016) Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa, *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA)*, 4 (2): 159-172.
- Pasolong, H. (2008). Teori Administrasi Publik. Bandung: CV Alfabeta.
- Permatasari, Y.G. (2014). Implementasi Pelayanan Atas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Studi Di Kabupaten Malang
- Pinayungan, J. Kusmanto, H. & Isnaini. (2018). Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *Jurnal Administrasi Publik :Public Administration Journal : Public Administration Journal*. 8 (1): 108-123.
- Purba, J.F. Tarigan, U. & Nasution, I. & Suharyanto, A. (2019). Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam Pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik. *PERSPEKTIF*, 8 (2): 77-83.
- Sarbini, A., Kusuma, A.R., dan Djumlani, A., (2016). Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, *Jurnal Administrative Reform*, Vol. 4 No.4 ,Oktober-Desember 2016
- Sari, P.A. Kadir, A. & Batubara, B.M. (2019). Peranan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara Dalam Pengawasan Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 1(1) 2019: 1-11
- Siagian, S.P., (2004), Organisasi, Kepemimpinan, Perilaku Administrasi, CV. Haji Mas Agung, Jakarta.
- Singarimbun, M. dan Effendi, E, (2008), Metode Penelitian Survei, Jakarta: LP3ES.
- Sinulingga, L.O. Nasution, M.H.T. & Batubara, B.M. (2018). Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Bagi Kendaraan Bermotor. *PERSPEKTIF*, 7 (1): 19-23
- Sirait, R.S.M.P., (2011), Analisis Pelayanan Publik Terhadap Administrasi Penerbitan Akta Kelahiran (Studi Pada Dinas Kependudukan Kota Medan), *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal : Public Administration Journal*, 1 (2): 232-249
- Solichin, A.W. (2002). Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Subarsono, A.G. (2011). Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi). Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Administratif. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Administratif. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2006). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung:Alfabeta
- Sugiyono. (2007). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Sugiyono.
- Syafiie, I.K. (2006), Ilmu Administrasi Publik, PT. Rineka Cipta, Jakarta,



- Tahir, A., (2014), Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bandung : Alfabeta
- Thomas, R. (2018). DESKRIPSI KEBIJAKAN DAN PERMASALAHAN KEPENDUDUKAN DI INDONESIA. Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area, 5(2), 6-16. doi:<https://doi.org/10.31289/publika.v5i2.1437>
- Trisna, P.D.P.E., Windari, R.A., & Adnyani, N.K.S., (2018). Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dalam penerbitan akta kelahiran anak luar kawin di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum (Volume 1 No. 2 Tahun 2018)
- Wibawa, S. (2014). Evaluasi Keijakan Publik. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Winarno, B, (2004), Teori dan Proses Kebijakan Publik, Jakarta : Media Pressindo.
- Zulkfli, (2013), Kajian Kebijakan Kependudukan di Indonesia, Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area, 1 (1): 38-48
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan
- Qanun Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur
- Qanun Aceh Timur No. 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur
- Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Aceh Timur
- Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur, Tahun 2017 - 2022
- Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur, Tahun 2018

